

RELEVANSI ANTARA KEPERCAYAAN AKAN JANJI PEMERINTAH DENGAN PRABU DRUPADA YANG MENEPATI JANJI DALAM SERAT PEDHALANGAN WAYANG PURWA

Firmansyah Andhika Pratama¹

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

e-mail : firmansyah.22086@mhs.unesa.ac.id

Adhimas Hayyun Pradhupa²

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

e-mail : adhimas.22043@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penggambaran Prabu Drupada sebagai pemimpin yang menepati janji dalam *Serat Pedhalangan Wayang Purwa* serta relevansinya dengan kepercayaan masyarakat terhadap janji pemerintah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan strukturalisme genetik, dengan data dari naskah, studi pustaka, dan wawancara. Analisis dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prabu Drupada merepresentasikan pemimpin ideal yang berintegritas dalam menepati janji sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Kepercayaan tokoh lain dibangun atas latar belakang, pendidikan, dan rekam jejak kepemimpinannya. Dalam konteks modern, terdapat kesenjangan antara nilai kepemimpinan ideal dan praktik politik yang kerap diwarnai pengingkaran janji, sehingga menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya integritas dan konsistensi serta relevansi nilai kearifan lokal dalam kehidupan sosial-politik.

Kata kunci : Percaya, Pemerintah, Janji, Prabu Drupada, strukturalisme genetik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the portrayal of Prabu Drupada as a leader who keeps his promises in Serat Pedhalangan Wayang Purwa and its relevance to public trust in government promises in Indonesia. This research employs a qualitative method with a genetic structuralism approach, using data from the manuscript, literature review, and interviews. Data analysis is conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that Prabu Drupada represents an ideal leader with high integrity, particularly in fulfilling promises as a basis of political legitimacy. The trust given by other characters is built upon his background, education, and leadership track record. In the modern context, there is a gap between ideal leadership values and contemporary political practices, which are often marked by broken promises, leading to declining public trust. This study emphasizes the importance of integrity and consistency, as well as the relevance of local wisdom values in socio-political life.

Keywords: Trust, Government, Promise, King Drupada, genetic structuralism.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, dunia politik memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam hubungan antara janji-janji pemerintah dengan tingkat kepercayaan publik. Janji-janji yang disampaikan oleh para pejabat, terutama dalam momentum pemilihan umum, seringkali menjadi instrumen utama untuk memperoleh simpati dan dukungan masyarakat. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit janji tersebut yang justru diingkari setelah para pejabat terpilih menduduki jabatan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena ekspektasi yang tinggi tidak sejalan dengan realisasi kebijakan yang dijanjikan.

Fenomena pengingkaran janji politik kerap muncul dalam berbagai pemberitaan, khususnya pada masa pesta demokrasi. Partai politik saling bersaing dengan menawarkan program-program unggulan untuk meyakinkan masyarakat. Menurut Susmayanti (2019:40), pesta demokrasi seharusnya dimaknai sebagai implementasi janji kampanye oleh pemenang pemilu dalam menjalankan pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Namun, realitas politik yang sarat kepentingan kelompok tertentu seringkali menyebabkan pemerintah mengabaikan komitmen yang telah disampaikan kepada publik.

Salah satu faktor penyebab terjadinya pengingkaran janji adalah adanya kepentingan politik dan ekonomi yang melatarbelakangi proses pemilihan pejabat. Dukungan dari berbagai pihak serta kebutuhan modal yang besar dalam proses politik membuat pejabat terpilih cenderung lebih mengutamakan kepentingan kelompok pendukungnya dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini diperkuat oleh penelitian Taufiqurrachman (2022) yang menunjukkan bahwa tindakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, seperti perayaan ulang tahun tokoh politik di tengah demonstrasi BBM, mencerminkan rendahnya sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Dampak dari kondisi tersebut salah satunya adalah meningkatnya fenomena golongan putih (golput) dalam pemilihan umum. Wibawa dan MahaDewi (2024:1069) menyebutkan bahwa golput dapat disebabkan oleh persepsi negatif terhadap politik, prioritas ekonomi masyarakat, serta rendahnya literasi politik. Persepsi bahwa politik hanya menguntungkan segelintir pihak memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap janji-janji yang disampaikan oleh para pejabat. Akibatnya, masyarakat menjadi skeptis dan apatis terhadap proses demokrasi.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji fenomena pengingkaran janji pemerintah. Nugraha (2020) dalam penelitiannya mengenai cover Majalah Tempo “Janji Tinggal Janji” mengungkapkan makna simbolik dari ingkarnya janji Presiden terhadap ekspektasi masyarakat, khususnya terkait revisi UU KPK. Penelitian tersebut juga mengaitkan pengingkaran janji dengan nilai moral dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya konsistensi antara ucapan dan tindakan. Selain itu, Dewi dan Siregar (2021) melalui pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara janji politik dan realisasinya dalam konteks yang sama.

Penelitian lain oleh Putra (2022) yang berjudul “*Kepercayaan Publik terhadap Janji Politik dalam Pemilu*” menunjukkan bahwa rendahnya realisasi janji kampanye berkontribusi signifikan terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memengaruhi partisipasi politik seperti meningkatnya golput. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu pengingkaran janji pemerintah telah banyak dikaji, baik melalui pendekatan media, semiotika, maupun perspektif kepercayaan publik.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada analisis representasi janji politik dalam media massa dan belum mengaitkannya dengan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam karya sastra tradisional. Di sinilah letak celah penelitian yang ingin diisi dalam studi ini. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji relevansi antara fenomena kepercayaan masyarakat terhadap janji pemerintah dengan representasi tokoh dalam naskah sastra klasik, yaitu Serat Pedhalangan Wayang Purwa, khususnya pada sosok Prabu Drupada yang dikenal sebagai raja yang menepati janji. Serat Pedhalangan Wayang Purwa merupakan salah satu koleksi naskah di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang mengisahkan cerita pewayangan, termasuk tokoh Dewi Srikandi dan Raden Arjuna. Dalam serat tersebut, Prabu Drupada sebagai raja Negara Campala digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana dan berintegritas, terutama dalam hal menepati janji. Nilai-nilai kepemimpinan yang tercermin dalam tokoh ini menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks sosial-politik masa kini.

Penelitian yang menggunakan Serat Pedhalangan Wayang Purwa sebagai objek kajian masih sangat terbatas, sehingga belum banyak dieksplorasi dalam perspektif sosiologi sastra, khususnya dalam kaitannya dengan fenomena politik kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian terhadap naskah tersebut, tetapi juga memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara karya sastra dan realitas sosial. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan strukturalisme genetik yang dikemukakan

oleh Lucien Goldmann. Menurut Darma (2004:47), Goldmann berpendapat bahwa karya sastra tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat. Helaluddin (2019:3) juga menegaskan bahwa karya sastra mencerminkan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat, serta dapat menjadi representasi dari harapan, kecemasan, dan aspirasi manusia. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk mengkaji keterkaitan antara nilai yang terkandung dalam tokoh Prabu Drupada dengan kondisi sosial masyarakat terkait kepercayaan terhadap pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penggambaran Prabu Drupada yang menepati janji dalam Serat Pedhalangan Wayang Purwa, dan (2) bagaimana relevansi penggambaran tersebut dengan kepercayaan masyarakat terhadap janji pemerintah di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap hubungan antara nilai kepemimpinan dalam karya sastra dengan realitas sosial kontemporer, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai pembelajaran bagi masyarakat maupun pemangku kebijakan dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2016:6), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti motivasi, perilaku, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik, serta disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sejalan dengan itu, Sahit (2021:6) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang didasarkan pada persepsi terhadap suatu fenomena, dengan data yang dihasilkan berupa deskripsi lisan dalam bentuk kalimat dari objek penelitian.

Kusumastuti dan Khoiron (2019:3) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berkaitan dengan fenomena dalam ilmu perilaku yang bertujuan untuk menemukan motif yang mendasari perilaku manusia. Sementara itu, Fiantika, dkk (2022:3) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik, melainkan melalui pemahaman dan penafsiran makna terhadap peristiwa, interaksi, dan perilaku subjek dalam situasi tertentu berdasarkan perspektif peneliti.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti buku referensi, jurnal ilmiah, serta naskah Serat Pedhalangan Wayang Purwa sebagai objek utama kajian. Menurut Rahmadi (2011:37), studi pustaka merupakan kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur. Fiantika, dkk (2022:34) menambahkan bahwa studi pustaka digunakan untuk menunjang data yang diperoleh dari sumber lain, termasuk hasil wawancara. Adapun sumber kepustakaan yang digunakan meliputi buku teks, jurnal, artikel ilmiah, serta literatur terkait pewayangan dan kepercayaan masyarakat terhadap janji pemerintah.

Selain itu, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data pendukung dari informan yang memiliki kompetensi dalam bidang pewayangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Informan dalam penelitian ini yaitu satu orang, yang dipilih menggunakan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria informan meliputi: (1) memiliki pengetahuan atau keahlian dalam bidang pewayangan, khususnya terkait Serat Pedhalangan Wayang Purwa, (2) memiliki pengalaman atau keterlibatan dalam kajian budaya atau sastra Jawa, dan (3) mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Rahmadi (2011:75), wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan, sedangkan Fiantika, dkk (2022:13) menyebutkan bahwa wawancara bertujuan untuk memperoleh dan bertukar informasi secara langsung.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan secara sistematis, yaitu: (1) reduksi data, dengan cara memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah; (2) penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan makna data berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kusumastuti dan Khoiron (2019:102) yang menyatakan bahwa analisis kualitatif digunakan apabila data tidak dapat diubah ke dalam bentuk angka. Selain itu, menurut Cresswell (dalam Kusumastuti dan Khoiron, 2019:126), analisis dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan sejak proses pengumpulan data berlangsung.

Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas data tidak diukur melalui instrumen, melainkan melalui kualitas informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan uji keabsahan data melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas,

dan confirmabilitas. Kredibilitas dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari studi pustaka dan wawancara. Transferabilitas berkaitan dengan kejelasan deskripsi konteks penelitian, sehingga memungkinkan penelitian dapat dipahami dan diterapkan pada konteks lain. Dependabilitas dilakukan dengan memastikan konsistensi proses penelitian, sedangkan confirmabilitas dilakukan dengan menjaga objektivitas peneliti dalam menginterpretasikan data. Hal ini sejalan dengan pendapat Fiantika, dkk (2022:178-179) mengenai standar keabsahan dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggambaran Prabu Drupada yang Menepati Janji di dalam Serat Pedhalangan Wayang Purwa

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Serat Pedhalangan Wayang Purwa* yang diperoleh dari koleksi digital Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor kodeks NB 295. Naskah ini mengisahkan kehidupan tokoh-tokoh pewayangan, khususnya Dewi Srikandi, Raden Arjuna, serta konflik antara Negara Campala dan Negara Paranggubarja. Dalam konteks ini, Prabu Drupada sebagai raja Negara Campala menjadi tokoh sentral yang merepresentasikan nilai kepemimpinan, terutama dalam hal komitmen terhadap janji.

Secara struktural, tokoh Prabu Drupada digambarkan sebagai raja yang adil, tegas, dan berwibawa. Namun, jika ditinjau melalui pendekatan strukturalisme genetik, penggambaran tersebut tidak hanya berfungsi sebagai elemen naratif, melainkan juga sebagai representasi dari nilai-nilai kolektif masyarakat yang mengidealkan pemimpin yang berintegritas. Dengan demikian, karakter Prabu Drupada dapat dipahami sebagai refleksi dari struktur sosial yang menempatkan kejujuran dan konsistensi sebagai fondasi legitimasi kekuasaan.

Salah satu bentuk konkret dari nilai tersebut terlihat pada janji Prabu Drupada untuk memberikan putrinya, Dewi Srikandi, kepada pihak yang mampu mengalahkan musuhnya. Hal ini tertuang dalam kutipan berikut:

/o/ Jangjinipun sang ngaPrabu/marang Prabu harimurti/sinten kang saged nirnakna/ing mungsuh ginanjar putri/kinarya pangebng-ebangsarira paduka gusti/-/(Kinanthi , 22;10)

Terjemahan :

/o/Janjinya sang raja/Kepada Prabu Harimurti (Kresna)/Siapa yang bisa/menyirnakkan musuh/Akan diberi hadiah yaitu Sang Putri/Digunakan sebagai ganjaran/Tubuh sang paduka raja/-/

Secara deskriptif, kutipan tersebut menunjukkan adanya janji politik dalam konteks kerajaan. Namun, secara analitis, janji ini dapat dimaknai sebagai bentuk kontrak sosial antara penguasa dan pihak lain (dalam hal ini sekutu). Dalam perspektif strukturalisme genetik, tindakan ini mencerminkan pandangan dunia (world view) masyarakat feodal yang menempatkan janji sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Janji bukan sekadar ucapan, melainkan representasi dari kehormatan dan kredibilitas seorang raja.

Selanjutnya, terdapat penegasan nilai moral bahwa seorang raja tidak boleh mengingkari janji, sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut:

/o/ Mendah silih sang ngaPrabu/sungkawa nira ing galih/ratu iku nora kenna/cidra/sasama ning aji/denne wus dadi jangjinya/marang Prabu arimurti/-/(Kinanthi , 22;25)

Terjemahan :

/o/ Supaya bergantian dengan sang raja/Hatinya merasa bersedih/Raja itu tidak boleh/Berbohong sesama sang aji/Sehingga sudah menjadi janjinya/Kepada Prabu harimurti (kresna)/-/

Pada bagian ini, teks tidak hanya menyampaikan peristiwa, tetapi juga menyisipkan norma etis yang bersifat universal. Konsep “raja tidak boleh berbohong” dapat dikaitkan dengan prinsip “Sabda Pandhita Ratu”, yang menekankan kesatuan antara ucapan, pikiran, dan tindakan. Dalam analisis kritis, nilai ini menunjukkan adanya konstruksi ideal tentang kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat pengarang. Dengan kata lain, teks ini berfungsi sebagai media internalisasi nilai moral kepada pembaca atau masyarakat.

Realisasi janji tersebut kemudian dibuktikan dalam kutipan berikut:

/o/ Anak Prabu tyas kawula/sampun bodho tan budi/sumonggèng karsa kèwala/rayi tuwan pun Srikandhi/Sang Prabu Harimurti/nolèh sarwi ngandikarum/eh ta Drêstha Jumêna/sira yayi ingsun tuding/dhawuhana kakangira si Arjuna/-/(Sinom,23:9)

Terjemahan :

/o/ Anakku Prabu, didalam hatinya / Sudah, terserah anda / Silahkan bertindaklah apa yang kau mau terhadap Srikandi /Sang Prabu Harimurti /Berbalik dan berkata /Eh, itu Drêstha Jumêna/Kamu yang aku tunjuk /Sampaikanlah kepada si Arjuna /-/

/o/ Kabèh sapanjalukira/bakyumu dhawuhna aglis/mring kakangira ing kana/lamun bisa anèkani/sayèkti sida rabi/lamun nora bisa wurung/Radyan Drestha Jumêna/sandika tur sêmbah mijil/praptèng jawi lampahé lajêng kéwala/-/ (Sinom,23:10)

Terjemahan :

/o/ Anakku Prabu, didalam hatinya / Sudah, terserah anda / Silahkan bertindaklah apa yang kau mau terhadap Srikandi /Sang Prabu Harimurti /Berbalik dan berkata /Eh, itu Drêstha Jumêna/Kamu yang aku tunjuk /Sampaikanlah kepada si Arjuna /-/

Jika ditinjau secara kritis, pemenuhan janji ini bukan sekadar konsekuensi dari kemenangan Arjuna, tetapi juga merupakan bentuk konsistensi moral Prabu Drupada sebagai pemimpin. Dalam perspektif strukturalisme genetik, tindakan ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif bahwa legitimasi kekuasaan bergantung pada integritas pemimpin. Peningkaran janji akan berimplikasi pada runtuhnya kepercayaan sosial, bahkan dalam konteks kerajaan.

Lebih jauh, jika dikaitkan dengan konteks sosial kontemporer, penggambaran Prabu Drupada ini dapat dibaca sebagai kritik implisit terhadap fenomena modern, khususnya praktik peningkaran janji dalam dunia politik. Teks klasik ini menghadirkan oposisi biner antara pemimpin ideal (yang menepati janji) dan realitas pemimpin modern yang kerap mengingkari komitmennya. Dengan demikian, karya sastra ini tidak hanya berfungsi sebagai cerita, tetapi juga sebagai refleksi sosial yang memiliki relevansi lintas zaman.

Selain itu, keputusan Prabu Drupada untuk tetap menepati janji meskipun menyangkut kepentingan pribadi (menikahkan putrinya) menunjukkan bahwa kepentingan moral dan tanggung jawab publik ditempatkan di atas kepentingan individu. Hal ini memperkuat interpretasi bahwa tokoh ini merepresentasikan nilai kepemimpinan ideal yang berorientasi pada integritas, bukan pragmatisme kekuasaan.

Dengan demikian, melalui analisis ini dapat disimpulkan bahwa penggambaran Prabu Drupada dalam *Serat Pedhalangan Wayang Purwa* tidak hanya bersifat naratif-deskriptif, tetapi juga mengandung makna ideologis yang mencerminkan harapan masyarakat terhadap figur pemimpin yang konsisten, jujur, dan bertanggung jawab. Nilai ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap janji pemerintah di era modern.

Hubungan Penggambaran Raja Campala yang Menepati Janji pada Serat Pedhalangan Wayang Purwa dengan Kepercayaan akan Janji Pemerintah di Indonesia

Pada bagian ini, analisis tidak hanya didasarkan pada teks *Serat Pedhalangan Wayang Purwa*, tetapi juga diperkuat dengan data wawancara dengan seorang dalang, Ki Radhitya Widiatmoko (Ngawi, 8 Juni 2024), sebagai informan yang memahami tradisi pewayangan. Namun, wawancara ini tidak diposisikan sebagai data utama, melainkan sebagai penguat interpretasi terhadap makna teks.

“Prabu Drupada sebenarnya bukan trah atau keturunan dari negara pancala. Raja sebelum Negara Campala adalah Prabu Gandabayu. Suatu ketika, Prabu Gandabayu menggelar sayembara tandhing Campala. Sayembaranya yaitu siapa yang bisa mengalahkan Gandamana akan bisa memboyong Dewi Gandawati. Sucitra (nama sebelum drupada) berpindah ke tanah Jawa ingin berguru kepada Prabu Pandhu karena mendengar kesaktian. Setelah berguru dengan Pandhu, Pandhu mendengar bahwa ada sayembara tersebut, Sucitra direkomendasikan oleh Pandhu agar mengikuti sayembara tersebut. Akhirnya Sucitra mengikuti sayembara, bertanding kepada Gandamana dan akhirnya kalah lalu mendapatkan putri boyongan yaitu Dewi Gandawati. Gandamana heran dengan kesaktian Sucitra dan bertanya dari mana asal dia berguru, Sucitra menjawab dari Prabu Pandhu. Dengan dasar Prabu Gandamana mempunyai rasa dia paling sakti dan ternyata dia masih ada yang bisa mengalahkan yaitu Sucitra murid Prabu Pandhu, akhirnya Gandamana mengambil keputusan supaya mengikuti jejak Pandhu yaitu menyerahkan darma baktinya kepada Pandhu. Karena tahta dari pancala sebenarnya adalah wewenang dari Gandamana tetapi Gandamana menolak menjadi raja dan memilih berguru kepada Pandhu. Gandabayu bingung, dan akhirnya tahta negara pancala diserahkan kepada putra mantu yaitu Sucitra”. (*Ki Radhitya Widiatmoko, 8 Juni 2024*)

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Prabu Drupada (Sucitra) bukanlah pewaris langsung tahta Negara Campala, melainkan memperoleh kekuasaan melalui pernikahan dengan Dewi Gandawati. Selain itu, terdapat peristiwa ketika Prabu Drupada berupaya mengembalikan tahta kepada pihak yang dianggap lebih berhak, yaitu Gandamana, meskipun pada akhirnya tidak diterima. Data ini menunjukkan bahwa Prabu Drupada tidak memiliki orientasi kekuasaan yang bersifat absolut, melainkan didasarkan pada kesadaran moral dan legitimasi yang sah.

Jika dianalisis secara kritis, latar belakang tersebut menjadi faktor penting yang membentuk karakter Prabu Drupada sebagai pemimpin yang menepati janji. Dalam perspektif strukturalisme genetik, pengalaman sosial tokoh (dalam hal ini proses

memperoleh kekuasaan yang tidak sepenuhnya berasal dari garis keturunan) memengaruhi pandangan dunia yang tercermin dalam tindakannya. Kesadaran bahwa kekuasaan yang dimiliki bukan sepenuhnya hak pribadi mendorong Prabu Drupada untuk menjaga integritas, salah satunya melalui konsistensi dalam menepati janji.

Suatu ketika ada insiden “Gandamana Luweng”. Gandamana diusir dari Negara Astina dan kembali ke Campala. Drupada mengetahui keadaan Gandamana lalu menyerahkan tahta Campala kepadanya karena sebenarnya tahta yang diduduki oleh Prabu drupada bukan wewenangnya dan harus kembali ke yang berhak merajai. Drupada tidak gila dengan kekuasaannya sehingga tahta dikembalikan kepada Gandamana, tetapi Gandamana tidak mau karena sumpahnya”. (Ki Radhitya Widiatmoko, 8 Juni 2024).

Dengan demikian, sikap Prabu Drupada yang menepati janji tidak hanya dapat dipahami sebagai sifat personal (luhur), tetapi juga sebagai hasil dari konstruksi sosial dan pengalaman historisnya. Ia memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Hal ini terlihat dari dua aspek utama, yaitu (1) kesediaan untuk mengembalikan tahta kepada yang lebih berhak, dan (2) konsistensi dalam menepati janji meskipun menyangkut kepentingan keluarga.

Jika dikaitkan dengan konteks sosial-politik di Indonesia saat ini, penggambaran Prabu Drupada tersebut memiliki relevansi yang kuat. Fenomena pengingkaran janji oleh pejabat publik yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan menunjukkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra seperti *Serat Pedhalangan Wayang Purwa* dapat berfungsi sebagai cermin sekaligus kritik terhadap realitas sosial.

Prabu Drupada merepresentasikan model kepemimpinan ideal yang menempatkan integritas dan konsistensi sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Sebaliknya, dalam realitas modern, banyak pemimpin yang justru kehilangan legitimasi akibat tidak menepati janji-janji politiknya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal yang diharapkan masyarakat dengan praktik politik yang terjadi. Lebih jauh, konsep “janji” dalam teks dapat dimaknai sebagai bentuk kontrak moral antara pemimpin dan pihak yang dipimpinnya. Dalam konteks modern, hal ini sejalan dengan konsep kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Ketika janji tersebut ditepati, maka kepercayaan publik akan meningkat. Sebaliknya, ketika janji diingkari, maka yang muncul adalah ketidakpercayaan, apatisme politik, bahkan fenomena golput.

Dengan demikian, relevansi antara penggambaran Prabu Drupada dan kepercayaan terhadap janji pemerintah terletak pada nilai integritas sebagai fondasi kepemimpinan. Karya sastra ini secara implisit menawarkan kritik sekaligus solusi terhadap permasalahan politik kontemporer, yaitu pentingnya konsistensi antara ucapan dan tindakan pemimpin. Nilai ini menjadi sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di Indonesia.

Kepercayaan dan Sikap Masyarakat

Kepercayaan merupakan salah satu aspek penting dalam relasi antara pemimpin dan pihak yang dipimpin. Kepercayaan tidak muncul secara instan, melainkan dibentuk melalui berbagai faktor, seperti rekam jejak, latar belakang, serta pengalaman sosial individu yang bersangkutan. Dalam konteks *Serat Pedhalangan Wayang Purwa*, tokoh Raden Arjuna dan Prabu Kresna dapat diposisikan sebagai representasi masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada pemimpin, dalam hal ini Prabu Drupada.

Kepercayaan tersebut tidak diberikan secara tanpa dasar, melainkan dilandasi oleh pengetahuan terhadap latar belakang Prabu Drupada. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara berikut:

“Karena Arjuna dan Prabu Kresna tau karena sucitra adalah murid kepada ayahnya. Dia mempunyai dasar, tidak mungkin dia akan mengingkari janji sebagai raja (*Ki Radhitya Widiatmoko, 2024*)”.

Jika dianalisis lebih dalam, kutipan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan dibangun melalui relasi sosial dan legitimasi moral yang telah terbentuk sebelumnya. Dalam perspektif strukturalisme genetik, hal ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif bahwa seorang pemimpin yang memiliki latar belakang pendidikan dan lingkungan yang baik cenderung memiliki integritas yang tinggi. Dengan demikian, kepercayaan Arjuna dan Kresna bukan hanya bersifat personal, tetapi juga merupakan hasil dari konstruksi sosial yang menilai pentingnya asal-usul dan proses pembentukan karakter pemimpin.

Faktor pendidikan juga menjadi aspek penting dalam membentuk kepercayaan tersebut. Hal ini terlihat dalam kutipan wawancara berikut:

“Jika melihat latar belakang kepemimpinan Prabu Drupada, faktor yang bisa membuat menjadikan ia pemimpin yang bijaksana dan menepati janji yaitu faktor pendidikan. Karena Prabu Drupada dahulu berguru kepada Prabu Pandhu yang memang latar belakang kepemimpinannya juga baik. Ilmu kepemimpinan yang ditularkan kepada Raden Sucitra atau Prabu Drupada

menjadi suatu faktor utama menjadikan pemimpin yang menjadi bijaksana dan menepati janji (*Ki Radhitya Widiatmoko, 8 Juni 2024*)”

Secara kritis, pernyataan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai-nilai etika dan kepemimpinan. Dalam konteks ini, Prabu Drupada merepresentasikan figur pemimpin yang terbentuk melalui proses pendidikan yang berorientasi pada nilai moral, sehingga menghasilkan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Hal ini sekaligus memperkuat legitimasi kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain.

Apabila dikaitkan dengan konteks masyarakat modern, pola pembentukan kepercayaan tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Dalam realitas politik saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin seringkali tidak didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap latar belakang dan integritas, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor pragmatis seperti citra, popularitas, atau janji kampanye. Akibatnya, ketika janji tersebut tidak ditepati, kepercayaan masyarakat menjadi mudah luntur.

Sikap masyarakat dalam merespons pengingkaran janji pemimpin juga menjadi bagian penting dalam analisis ini. Hal tersebut tercermin dalam kutipan wawancara berikut:

“Kita sebagai masyarakat, cara menyikapi para pemimpin yang ingkar janji pada saat ini adalah dengan cara mengutarakan sebuah protes atau kritikan. Tetapi dengan dasar memberikan kritik yang bijaksana dan membangun, bukan menjatuhkan dan memaki. Karena dijamin sekarang banyak masyarakat yang mengkritik dengan tindak anarkis. Jadilah masyarakat yang kritis, memberikan kritikan dengan cara bijaksana tanpa adanya tindak anarkis (*Ki Radhitya Widiatmoko, 8 Juni 2024*)”.

Dari sudut pandang analitis, pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai pihak yang memberikan kepercayaan, tetapi juga sebagai agen kontrol sosial terhadap kekuasaan. Kritik yang konstruktif menjadi bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas kepemimpinan. Dalam konteks sosiologi sastra, hal ini dapat dimaknai sebagai refleksi dari nilai-nilai ideal yang diharapkan hadir dalam hubungan antara pemimpin dan masyarakat, yaitu hubungan yang bersifat dialogis, bukan represif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin, sebagaimana direpresentasikan melalui tokoh Arjuna dan Kresna, dibangun atas dasar pengetahuan terhadap latar belakang, pendidikan, dan integritas pemimpin tersebut. Sementara itu, dalam konteks modern, kepercayaan masyarakat cenderung lebih rapuh akibat kurangnya konsistensi antara janji dan realisasi. Oleh karena itu, karya *Serat*

Pedhalangan Wayang Purwa tidak hanya menghadirkan narasi, tetapi juga memberikan refleksi kritis mengenai pentingnya membangun kepercayaan melalui integritas, serta pentingnya sikap kritis masyarakat dalam menjaga akuntabilitas pemimpin.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggambaran Prabu Drupada dalam *Serat Pedhalangan Wayang Purwa* merepresentasikan model kepemimpinan ideal yang berlandaskan pada integritas, khususnya dalam menepati janji. Komitmen tersebut tidak hanya bersifat personal, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial, latar belakang kekuasaan, serta proses pendidikan yang membentuk kesadaran moral sebagai pemimpin. Dalam perspektif strukturalisme genetik, karakter Prabu Drupada mencerminkan pandangan dunia masyarakat yang menempatkan konsistensi antara ucapan dan tindakan sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Lebih lanjut, kepercayaan yang diberikan oleh tokoh lain, seperti Raden Arjuna dan Prabu Kresna, menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemimpin dibangun atas dasar pengetahuan terhadap rekam jejak, latar belakang, dan integritas, bukan semata-mata pada janji yang diucapkan. Hal ini menegaskan bahwa kepercayaan merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks, bukan sesuatu yang bersifat instan.

Dalam konteks sosial-politik modern di Indonesia, temuan ini mengungkap adanya kesenjangan antara nilai kepemimpinan ideal dalam teks dengan praktik politik kontemporer, di mana pengingkaran janji masih sering terjadi dan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, *Serat Pedhalangan Wayang Purwa* tidak hanya berfungsi sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai refleksi kritis yang menawarkan nilai normatif bagi praktik kepemimpinan saat ini. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui integritas yang konsisten, serta pentingnya menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai rujukan dalam membangun kembali relasi antara pemimpin dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Darma, B. (2004). *Pengantar teori sastra*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dewi, R., & Siregar, M. (2021). Analisis semiotika Charles Sanders Peirce pada cover Majalah Tempo “Janji Tinggal Janji”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 45–58.

- Fiantika, F. R., dkk. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Helaluddin. (2019). *Strukturalisme genetik Lucien Goldmann dalam kajian sastra*. Bandung: Media Akademi.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, F. (2020). Makna pesan “Janji Tinggal Janji Jokowi” pada cover Majalah Tempo edisi 16–22 September 2019. *Jurnal Komunikasi*, 8(1), 80–90.
- Putra, A. (2022). Kepercayaan publik terhadap janji politik dalam pemilu. *Jurnal Sosial Politik*, 10(1), 15–28.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Sahit, R. (2021). *Metode penelitian kualitatif perspektif praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Susmayanti. (2019). Implementasi janji kampanye dalam pesta demokrasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 35–45.
- Taufiqurrachman, M. (2022). Konstruksi mahasiswa Unesa mengenai perayaan ulang tahun Puan di tengah demonstrasi BBM. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 6(2), 100–112.
- Wibawa, A., & MahaDewi, N. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi golongan putih (golput) dalam pemilu. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 12(2), 1065–1075.